

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menceritakan masa lampau, media turut membentuk memori kolektif yang tidak selalu netral. Sebab, memori tersebut bergantung pada perspektif pembuatnya. Sebagai contoh, pria kulit hitam kerap digambarkan secara negatif, baik sebagai sosok yang brutal dan kejam, maupun penghibur tanpa kecerdasan dalam sejarah film Hollywood (Wu Yajun dalam Li & Chen, 2021, p. 116). Dalam jurnalisme, Zelizer (2022) menjelaskan bahwa terdapat dua level produksi berita, yaitu *frontstage* dan *backstage*. *Frontstage* adalah bagian yang tampak bagi publik, seperti informasi *on the record* dan laporan berita yang disusun sesuai dengan standard profesional. Sementara itu, *backstage* adalah bagian yang membuat keputusan editorial. Dengan begitu, bagian tersebut lebih fleksibel dan dapat mencerminkan kepentingan tertentu (Zelizer, 2022, p. 4). Konsep ini menunjukkan bahwa berita yang sampai ke publik telah melalui serangkaian seleksi dan penyuntingan yang tidak selalu netral. Hal tersebut memperkuat gagasan bahwa media tidak hanya menjadi cermin realitas, tetapi juga alat konstruksi narasi sejarah yang dikendalikan oleh kebijakan editorial (Zelizer, 2022, p. 4). Dengan kekuatan yang tak terhindarkan, media mengontrol memori kolektif melalui narasi yang mereka sajikan. Pengaruh luasnya juga memungkinkan narasi tersebut menjangkau dan mempengaruhi masyarakat secara lebih besar.

Menurut Edy dalam Kligler-Vilenchik, Tsifti, & Meyers (2014), media memainkan peran krusial dalam menjangkau audiens yang luas dan memberikan interpretasi atas masa lampau yang 'sulit dihindari'. Frasa ini menegaskan bahwa media merupakan alat yang berkuasa dalam membentuk memori kolektif. Neiger (2020) juga menegaskan bahwa media bertindak sebagai agen memori dengan menentukan siapa yang termasuk dalam kelompok memori kolektif, dan siapa yang tidak. Zanynu (2018) dalam artikelnya juga mengakui bahwa media memiliki peran dalam membatasi apa yang dianggap

sebagai memori kolektif. Sementara itu, Zelizer (2022) menyatakan bahwa media menggunakan narasi sejarah untuk membuat liputan relevan dengan konteks zaman sekarang. Contohnya adalah menggunakan istilah ‘perang dingin baru’ dalam menjelaskan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini menggarisbawahi peran media dalam menentukan narasi sejarah.

Selain berfungsi sebagai penyebar dan pembentuk narasi memori, media juga memiliki kekuasaan dalam menentang narasi dominan memori kolektif. Dengan memperkenalkan narasi yang berbeda, media dapat menjadi agen yang meruntuhkan pandangan mayoritas yang telah mengakar. Proses ini dilakukan dengan cara menciptakan ruang bagi interpretasi. Terutama dalam konteks sejarah yang kontroversial.

Ikhwan, Yulianto, & Parahita (2019) berargumen bahwa narasi memori yang disampaikan melalui media baru dapat melawan narasi dominan. Mereka menyatakan bahwa proses menghilangkan mitos seputar peristiwa 1965 dan dampaknya merupakan proses panjang yang belum selesai. Peri (1999) juga menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam membimbing publik melalui peringatan nasional, seperti dalam hal peringatan kematian Yitzhak Rabin. Media dengan sengaja membentuk bingkai komemorasi untuk memperkuat solidaritas sosial dan mendapatkan legitimasi publik.

Meskipun media memiliki kekuatan besar dalam membentuk memori kolektif, pemaknaan terhadap memori sering tereduksi. Menurut Zelizer (2018), hal ini terjadi karena media cenderung mempertahankan cara pandang lama dalam menafsirkan peristiwa kontemporer, sehingga nilai dari memori orisinalnya sering kali tereduksi. Sebagai contoh, media Amerika Serikat menggunakan ‘kacamata’ perang dingin untuk menafsirkan isu-isu masa kini, seperti ISIS, tanpa mempertimbangkan relevansinya terhadap konteks yang sedang berlangsung (Zelizer, 2018, p. 18). Mengetahui hal ini, makna memori perang dingin berpotensi tereduksi. Padahal, sebagai agen memori, media seharusnya memiliki peran yang bersifat merawat ingatan kolektif secara utuh.

Tidak hanya substansinya yang harus dipertahankan, media juga memiliki peran untuk merawat ingatan kolektif secara berkelanjutan. Menurut Meyers, Zandberg, & Neiger (2011), media tidak hanya menyajikan ingatan kolektif, tetapi juga secara aktif membentuk dan memeliharanya. Hal ini tertanam melalui kesadaran perannya sebagai agen memori. Meyers et al (2012) memberikan produksi berita mengenai peristiwa Holokaus sebagai contoh. Menurut informan penelitiannya, media sulit untuk memperdebatkan keinginan audiens. Dengan begitu, dalam memberitakan suatu peristiwa, suatu media akan memberitakan hal yang menangkap perhatian konsumernya. Masalahnya, menurut informan penelitian Meyers, untuk mendapatkan perhatian konsumen, siaran mengenai peristiwa Holokaus baiknya tidak di Hari Holokaus. Hal seperti ini membuktikan bahwa media memiliki pertimbangan dalam merawat ingatan kolektif.

Sejumlah riset terdahulu di atas membuat penting untuk meneliti lebih dalam bagaimana kebijakan redaksi dan dinamika kekuasaan di dalamnya memengaruhi penyajian narasi sejarah. Riset-riset terdahulu juga menekankan pentingnya studi lebih lanjut mengenai produksi konten dalam memori media, termasuk bagaimana kebijakan redaksi berkontribusi terhadap narasi yang disajikan kepada publik (Neiger, 2020, p. 6; Zanynu, 2018, p. 31). Dengan demikian, penting untuk menyelidiki lebih dalam kebijakan redaksi sebagai faktor penentu dalam proses produksi konten yang berfungsi sebagai salah satu bentuk kekuasaan dalam menetapkan memori publik. Dengan mempertimbangkan celah tersebut, penelitian ini hendak mendalami kebijakan redaksi dan dinamika kekuasaan dalam memori media, serta meneliti bagaimana media dapat berperan dalam membentuk narasi sejarah yang berkelanjutan di majalah.

Pengetahuan mengenai dinamika redaksi nantinya bisa didapatkan melalui wawancara dengan penulis maupun editor yang terlibat dalam proses liputan peristiwa 1965 di *Majalah Tempo* dan *Historia.id*. Namun, penulis tetap membutuhkan informasi mengenai dinamika redaksinya. Dengan demikian,

pengetahuan ini akan didapatkan melalui redakstur yang terlibat, walau secara tidak langsung.

2.2 Teori atau Konsep yang digunakan

2.2.1 Teori *Hierarchy of Influence*

Pembicaraan soal kebijakan redaksi tidak lepas dari keputusan editorial yang nantinya memengaruhi konten yang dihasilkan. Hal ini diterapkan dalam teori *hierarchy of influence*, karena mencerminkan lapisan organisasi dalam modelnya. Menurut Reese (2019), teori tersebut mendeskripsikan pelbagai faktor yang memengaruhi produksi konten dalam lima lapisan. Model ini digambarkan dalam bentuk lingkaran kosentris yang dimulai dari level individu. Level ini memaparkan bagaimana suatu pemberitaan dipengaruhi oleh karakteristik personal sang jurnalis yang berdampak pada pekerjaan mereka (Reese, 2019, p. 2). Selanjutnya adalah level rutinitas organisasi. Lapisan ini mencerminkan kebiasaan atau pola kerja suatu redaksi, seperti gaya penulisan dan kecenderungan bingkai konten (Reese, 2019, p. 2).

Adapun level organisasi dengan fokus pada tujuan dari kepemilikan perusahaan media. Hal ini kerap kali bersinggungan dengan motif ekonomi. Pada lapisan yang lebih atas terdapat level 'extra media'. Dalam perkembangannya, istilah tersebut berubah menjadi '*social-institutional*' dan menyoroti peran media dalam sistem institusi yang lebih luas dalam menghadapi ancaman kolektif yang lebih besar (Reese, 2019, p. 2). Pada level paling makro, terdapat level 'ideologis' yang kemudian diubah menjadi level sistem sosial. Spektrum ini merefleksikan elemen dalam level yang berbeda bekerja untuk memproduksi karya jurnalistik. Perubahan nama dilakukan untuk mencerminkan keberadaan jurnalisme yang tidak hanya terbatas pada analisis ideologi atau budaya, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar dan kompleks (Reese, 2019, p. 2).

Teori ini pertama dikonstruksi oleh Sosiolog Herbert Gans dan Todd Gitlin, tetapi Shoemaker dan Reese memformalisasi perumusannya. Pada masa pasca Perang Dunia II, studi komunikasi di Amerika lebih berpusat pada proses dan dampak media. Perihal konten dan kontrol media dalam memproduksi berita belum begitu berkembang. Namun, seiring berjalannya waktu, pada 1970-an, penelitian mengenai ruang redaksi mulai mendapat perhatian. Hasilnya menyatakan bahwa keputusan redaksi dipengaruhi oleh konteks institusional dan ideologis yang lebih besar (Reese, 2019, p.1). Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gans dan Gitlin.

Baran & Davis (2013) dalam *'Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, Future'* tidak secara spesifik membentangkan teori *hierarchy of influence*. Namun, mereka menjelaskan tentang teori ekonomi politik yang fokus pada pengaruh faktor ekonomi dan industri dalam proses produksi dan distribusi konten. Sut Jhally dalam Baran & Davis (2013) juga menekankan bahwa nilai tukar/keuntungan ekonomi seringkali dikendalikan oleh pasar. Ketika konten yang disukai pasar menghasilkan keuntungan, media cenderung memprioritaskannya, mengorbankan konten yang mungkin lebih bermakna demi mengejar keuntungan. Pandangan ini beririsan dengan level extra media dalam teori *hierarchy of influence*. Keduanya menunjukkan potensi homogen: perusahaan kerap mengutamakan motif ekonomi sebagai prioritas memproduksi konten.

Dalam penerapannya, teori ini digunakan dalam artikel bertajuk *'Hierarchy of Influences on Transitional Journalism – Corrupting relationship between political, economic and media elites.'* Penelitian Milojević & Krstić (2018) ini mewawancara pelaku industri media selama 12 tahun. Secara spesifik, mereka yang terlibat adalah jurnalis dalam proyek Media Center Belgrade (MCB), *focus group discussion* dengan jurnalis dan pemilik media pada 2011 serta 2012. Adapun sejumlah jurnalis dan editor yang diamati dalam proyek Media, Conflict, and Democratisation (MeCoDEM). Total dari keseluruhan partisipan penelitian adalah 158

orang. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana jurnalis, manajer, dan pemilik media melihat pengaruh eksternal selama masa transisi demokrasi di Serbia. Fokus utamanya mencakup kondisi politik dan ekonomi yang memengaruhi organisasi media, rutinitas kerja, dan individu. Penelitian tersebut juga menyematkan budaya korupsi dan klienelisme dalam faktor politik dan ekonomi. Hasilnya, korupsi dan jaringan klienelisme antara aktor politik, ekonomi, dan media berperan besar dalam memengaruhi kebijakan redaksi dan praktik jurnalisme. Tekanan dari pemilik media, kepentingan politik, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil memperkuat pola hierarki pengaruh dari tingkat sistem sosial hingga individu. Jurnalis sering menghadapi kendala, seperti gaji rendah, kontrak kerja tidak tetap, dan tuntutan untuk mengikuti arahan pemilik atau editor. Menurut Milojević dan Krstic (2018), kendala tersebut melemahkan otonomi dan integritas profesional mereka.

Dalam penelitiannya, Fahmy dan Johnson (2012) juga menggunakan model *hierarchy of influence* untuk menganalisis bagaimana jurnalis yang ditempatkan bersama militer dalam Perang Irak menilai kinerja peliputan mereka, serta apa saja faktor yang memengaruhi persepsi tersebut dalam dua fase, yakni invasi dan okupasi. Data dikumpulkan melalui dua survei daring terhadap total 277 jurnalis yang menyatu dengan pasukan militer Amerika Serikat di Irak pada periode 2004 dan 2005–2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para jurnalis tetap menilai kinerja mereka secara positif, meskipun mereka juga mengakui bahwa sistem penempatan bersama pasukan memiliki keterbatasan karena hanya ada di satu unit militer. Namun, dibandingkan saat fase invasi, pada tahap okupasi mereka menjadi lebih kritis, terutama terkait kelayakan mereka untuk tugas tersebut dan potensi liputan yang cenderung sensasional. Dari segi pengaruh, nilai-nilai profesional tetap menjadi faktor paling dominan. Namun, seiring pergeseran dari invasi ke okupasi, pengaruh dari faktor-faktor tingkat atas seperti keselamatan pribadi dan pemahaman budaya lokal meningkat secara signifikan. Namun secara keseluruhan, tidak ditemukan bukti kuat bahwa

satu level hierarki lebih dominan dari yang lain, yang menunjukkan bahwa pengaruh antarlevel bersifat kontekstual dan saling terkait.

Penelitian-penelitian di atas sejalan dengan penelitian penulis dalam konteks Indonesia. Sebab, kedua media yang penulis pilih menentukan bagaimana peristiwa 1965 dikisahkan, termasuk pemilihan narasumber, pendekatan jurnalistik, dan frekuensi pemberitaan. Dengan menerapkan teori hierarki pengaruh, penulis dapat menganalisis faktor apa saja yang turut membentuk narasi yang disampaikan kepada publik.

Teori hierarki pengaruh juga akan membantu menavigasi pertanyaan yang perlu diberikan pada penulis dan redaktur yang terlibat dalam liputan peristiwa 1965 di *Majalah Tempo* dan *Historia.id*. Penulis nantinya bisa menyimpulkan hal yang menentukan kebijakan redaksi kedua media, dan pada level apa hal tersebut berkontribusi pada kebijakan redaksi yang memengaruhi produksi kontennya. Dengan begitu, penulis juga dapat melihat apa pengaruh paling besar dalam konstruksi makna peristiwa 1965.



2.2.2 Memori Media

Memori kolektif dapat diupayakan melalui berbagai platform, tidak terbatas pada media jurnalistik. Media populer atau karya budaya dan seni, seperti film, novel, atau cerpen, juga memainkan peran penting dalam membentuk memori kolektif. Pendekatan ini sering kali lebih diterima karena sifatnya yang menggabungkan fakta dan fiksi, sehingga resistensi dari masyarakat atau pemerintah cenderung lebih minim. Dalam konteks ini, media budaya mampu menyampaikan kebenaran dengan cara yang halus tapi sesuai kenyataan.

Seno Gumira Ajidarma dalam bukunya *'Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara'* menceritakan bagaimana ia diberhentikan dari media *Jakarta Jakarta* karena mengangkat Insiden Dili, peristiwa kekerasan yang mencakup pemotongan telinga aktivis pada 1991. Ajidarma pun akhirnya mengabadikan insiden ini melalui cerpen 'Telinga', sebuah karya yang penuh sarkasme. Cerpen tersebut membingkai fakta dengan pendekatan sastra yang subtil, tidak langsung menghadirkan fakta keras, tetapi tetap bertumpu pada kebenaran (Ajidarma, 2005, p. 41). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana seni dan sastra mampu menjadi medium pengarsipan memori kolektif yang tak mudah dijegal. Berbeda dengan produk jurnalistik yang eksplisit dalam menyampaikan kritiknya.

Pasca-reformasi, kebebasan media untuk mengangkat fakta keras menjadi lebih terbuka. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1990. UU ini menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara (Undang-Undang Pers, 1990, pasal 4). Pasal tersebut juga menyatakan bahwa pers nasional tidak akan disensor dan dibredel. Dengan fakta tersebut, studi ini hendak menelaah sejauh mana memori kolektif yang disampaikan oleh media jurnalistik dapat berfungsi untuk memberikan pemaknaan memori kolektif. Dalam konteks inilah memori media muncul sebagai mekanisme utama untuk mengeksplorasi memori kolektif.

Memori kolektif berhubungan erat dengan proses mediasi (Halbwach, 1992, p. 34). Mediasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai ekspresi publik yang berperan sebagai sarana bagi komunitas untuk mengekspresikan serta memperkuat identitas kolektif mereka (Zandberg, Meyers, & Neiger, 2011, p. 127). Bentuk-bentuk ekspresi ini merupakan wujud konkret untuk merekonstruksi masa lampau yang ada pada memori kolektif. Di masa kini, media menjadi salah satu situs rekonstruksi paling lazim (Neiger, et al., 2011, p. 5).

Istilah memori media sebenarnya bermula dari konsep ‘memori kolektif’ yang pertama kali diperkenalkan oleh Hugo Van Hofmannsthaal pada 1902. Namun, sosiolog Prancis, Maurice Halbwachs lebih dikenal sebagai tokoh utama dalam studi memori kolektif (Neiger, et al., 2011, p. 2). Argumen dasar Halbwachs adalah kelompok sosial selalu merekonstruksi sejarah dengan gambaran masa lalu mereka (Neiger, et al., 2011, p. 3). Kesadaran bahwa memori kolektif bergantung pada platform ekspresi publik mendorong pergeseran konsep menuju memori media. Praktik ini memengaruhi cara memori diingat (Özkul, & Humphreys, 2015, p. 3).

Salah satu penelitian yang berpusat pada memori kolektif adalah *‘The Media and Collective Memory of Yitzhak Rabin’s Remembrance’* karya Yoram Peri (1999). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media turut berperan dalam membentuk cara masyarakat mengingat suatu peristiwa dalam sejarah mereka. Hal ini berbanding lurus dengan salah satu karakteristik memori kolektif, yaitu setiap komunitaslah yang berperan dalam mengembangkan dan membatasi ingatan kolektifnya (Zandberg, Meyers, & Neiger, 2012, p. 68).

Konsep ini bersinggungan dengan penelitian penulis karena penulis berkonsentrasi pada kebijakan redaksi dalam media terkait peristiwa 1965. Peristiwa ini merupakan bagian dari sejarah, sehingga patut dikategorikan sebagai bentuk memori. Selain itu, sesuai dengan fitur memori kolektif, kebijakan redaksi berperan sebagai pembingkai memori tersebut.

2.2.3 Media Ritual

Media ritual merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana media tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga membentuknya melalui tindakan yang berulang dan terstruktur. Couldry (2003) memperkenalkan konsep ini untuk menunjukkan bagaimana media membentuk pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap penting dalam kehidupan sosial. Menurutnya, media ritual tidak hanya terbatas pada acara tertentu, tetapi juga mencakup sistem dan praktik media. Hal inilah yang nantinya membentuk cara masyarakat memahami peristiwa sosial.

Dimensi ritual dalam media mencerminkan bagaimana media tidak hanya menampilkan realitas, tetapi juga mengkategorikan dan membentuknya secara simbolis. Couldry (2003) menjelaskan bahwa klaim media terhadap 'realitas' selalu melibatkan proses kategorisasi ritual. Hal tersebut terdiri dari realitas dan interaktivitas.

Pada kategori realitas, hal yang diklaim autentik sebenarnya dikonstruksi di balik layar (Couldry, 2003, p. 104). Proses produksinya menentukan bagaimana suatu peristiwa disajikan kepada audiens. Meskipun teknologi dan teknik perekaman langsung membantu membuat tayangan tampak lebih natural, realitas yang terpampang di media tetap tidak sepenuhnya otentik. Sebab, pelaku medialah yang berkuasa dalam membentuk realitasnya. Bahkan dalam format *live action* dengan penyuntingan minimal, televisi tetap memiliki kekuatan untuk membentuk realitas melalui penggunaan teks, logo, atau simbol lainnya. Ini saja sudah cukup untuk mengontrol narasi yang diterima audiens (Couldry, 2003, p. 106).

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Ritual media juga menghadirkan ilusi keterbukaan dengan menampilkan individu dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga jati diri mereka semakin terlihat (Couldry, 2003, p. 108). Walaupun media tampak memberi ruang bagi orang-orang untuk menampilkan diri mereka secara spontan, ia tetap memegang kendali atas bingkai yang ditampilkan. Pada akhirnya, media menentukan apa yang boleh ditampilkan dan apa yang disaring. Menurut Couldry (2003), hal ini justru mempertegas batasan antara ‘orang biasa’ yang hanya muncul di media dan ‘orang media’ yang memiliki kontrol atas narasi tersebut.

Interaktivitas dalam media ritual juga berperan dalam membentuk pengalaman audiens. Hal ini berasal dari keinginan manusia untuk terhubung (Couldry, 2003, p. 105). Bentuk interaktivitas ini bisa dilihat melalui fitur seperti *live chat*, sinetron berbasis web interaktif, atau opsi bagi penonton untuk memilih sudut kamera dalam suatu *reality show* (yang berbeda dengan siaran televisi yang hanya menampilkan cuplikan yang sudah diedit oleh tim produksi). Namun, meskipun tampak memberikan kebebasan bagi audiens, interaktivitas ini sebenarnya ‘dibentuk’ oleh media agar tetap bermakna bagi audiens (Couldry, 2003, p. 109). Dengan demikian, media ritual tidak hanya menciptakan ruang bagi keterlibatan audiens, tetapi juga mengontrol bagaimana realitas, keterbukaan, dan interaksi tersebut diorganisasi dan dipersepsikan oleh masyarakat.

Meyers, et al. (2011, p. 127) menunjukkan bahwa media tidak sekadar melaporkan ritual sosial, tetapi juga membentuk ritualnya sendiri. Meyers, et al. (2009) mencontohkan dalam konteks *Memorial Day for the Holocaust and the Heroism (MDHH)*. Media Israel mengatur siaran tahunan yang secara sistematis menyusun narasi Holocaust sebagai bagian dari ingatan kolektif. Siaran ini pun bersifat liminal, alias terjadi dalam waktu yang terpisah dari rutinitas biasa. Dengan begitu, siaran tersebut memiliki makna sosial yang lebih signifikan.

Dalam praktiknya, media ritual sering kali menghadapi dilema antara profesionalisme dan kewajiban moral. Jika melihat pada penelitian Meyers, et al. (2011), media Israel harus menyeimbangkan antara kebutuhan menarik perhatian audiens dan tanggung jawab dalam merawat ingatan kolektif. Produksi siaran MDHH menunjukkan bagaimana media menggunakan pola yang berulang untuk membangun makna peristiwa dan mempertahankan relevansinya dalam kesadaran masyarakat.

Konsep media ritual dalam studi ini relevan dengan kebijakan redaksi dalam merawat ingatan kolektif di *Majalah Tempo* dan *Historia.id* mengenai liputan peristiwa 1965. Sebagaimana media Israel membangun narasi Holocaust melalui ritual penyiaran tahunan, media di Indonesia juga memiliki peran dalam menyusun dan menjaga memori kolektif tentang peristiwa sejarah. Kebijakan redaksi menentukan bagaimana peristiwa diangkat, kapan akan dibahas, siapa yang diberi suara, dan bagaimana memori tersebut direproduksi. Dengan demikian, media ritual membantu memahami bagaimana kebijakan redaksi membentuk pemaknaan kolektif terhadap sejarah.



2.2.4 Peristiwa 1965

Peristiwa 1965 mengacu pada rangkaian kejadian yang dimulai dengan pembunuhan enam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat pada 30 September 1965. Insiden ini berkembang menjadi operasi penumpasan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan masyarakat awam yang dianggap memiliki keterkaitan dengan organisasi tersebut. Pada malam kejadian, beberapa anggota PKI mendatangi kediaman para jenderal dengan alasan bahwa mereka diperintahkan untuk menghadap Presiden Soekarno. Para jenderal yang ditangkap kemudian dibawa ke sebuah markas di Pondok Gede, Jakarta Timur dan dieksekusi, serta jasadnya dimasukkan ke dalam sumur yang kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya. Peristiwa ini tidak hanya terbatas di Jakarta, tetapi juga meluas ke berbagai wilayah lain seperti Yogyakarta dan sekitarnya (CNN Indonesia, 2024).

Setelah peristiwa tersebut, PKI secara luas diposisikan sebagai ancaman nasional. Narasi yang berkembang menyebut bahwa PKI merupakan dalang di balik kudeta yang gagal, sehingga gelombang aksi massa bermunculan menuntut pembubaran partai tersebut. Dalam situasi tersebut, tindakan represif terhadap individu yang dianggap terafiliasi dengan PKI marak dilakukan (CNN Indonesia, 2024).

Peristiwa ini menjadi titik awal dari serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung selama periode 1965-1966. Mereka yang dituduh terlibat dalam PKI mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari penangkapan dan interogasi, pemenjaraan, pengasingan ke Pulau Buru, hingga penyiksaan dan eksekusi tanpa pengadilan. Dalam beberapa dekade setelahnya, pendekatan pemerintah terhadap peristiwa ini mengalami perubahan, meskipun kontroversi mengenai tanggung jawab negara masih terus berlanjut (BBC Indonesia, 2023).

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Dalam upaya penyelesaian, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi salah satu pemimpin yang secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada korban tragedi 1965. Pada 1999, ia mengundang kembali para eksil politik yang selama bertahun-tahun tidak dapat kembali ke Indonesia dan menginstruksikan pemulihan hak-hak mereka. Gus Dur juga mengusulkan pencabutan Tap MPRS No. XXV/1966 yang melarang PKI serta ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme di Indonesia dengan alasan bahwa regulasi tersebut bertentangan dengan konstitusi (TEMPO.co, 2021).

Di tingkat internasional, International People's Tribunal 1965 (IPT 65) digelar di Den Haag pada 10-13 November 2015 sebagai forum untuk menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia pasca-tragedi 1965. Tribunal ini menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan yang pada 1965 merupakan tanggung jawab negara Indonesia. IPT 65 juga mencatat bahwa tindakan tersebut tidak hanya menargetkan anggota PKI, tetapi juga kelompok lain seperti loyalis Soekarno, anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), serikat buruh, dan serikat guru, serta komunitas Tionghoa. Tribunal ini mengategorikan kejahatan tersebut sebagai genosida dan merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk mengakui perannya, meminta maaf kepada korban, melakukan investigasi lebih lanjut, mengadili pelaku, serta memberikan kompensasi kepada para penyintas (BBC Indonesia, 2016).

Pemerintah Indonesia tidak menggubris IPT 65 dengan alasan bahwa tribunal tersebut tidak memiliki kewenangan terhadap Indonesia. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum sendiri dan tidak dapat didikte oleh pihak luar. Ia juga membantah klaim genosida dan menekankan bahwa jumlah korban masih perlu dibuktikan lebih lanjut (KOMPAS.com, 2016). Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, turut menegaskan bahwa IPT 65 bukan pengadilan resmi dan keputusannya tidak memiliki implikasi hukum di Indonesia (KOMPAS.com, 2016).

Pada era pemerintahan Joko Widodo, pendekatan penyelesaian dilakukan melalui mekanisme non-yudisial. Pada 2022, pemerintah membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM) untuk meneliti dan memberikan rekomendasi terkait peristiwa ini (KOMPAS.com, 2022). Setahun kemudian, Jokowi secara resmi mengakui bahwa tragedi 1965 merupakan salah satu dari dua belas pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Pernyataan tersebut disertai dengan ungkapan penyesalan, tetapi tanpa permintaan maaf secara eksplisit (KOMPAS.com, 2023).

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 yang memuat rekomendasi penyelesaian non-yudisial bagi korban tragedi 1965. Beberapa langkah pemulihan yang direncanakan mencakup pemberian kompensasi finansial dan non-finansial, rehabilitasi fisik dan psikologis bagi penyintas, restitusi bagi keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya, pembangunan monumen peringatan, revisi terhadap pelajaran sejarah di sekolah, dan pemberian beasiswa, serta bantuan tempat tinggal bagi keluarga korban (BBC Indonesia, 2023).

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari para penyintas. Beberapa korban, seperti Bedjo Untung dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, mengungkapkan kekecewaan karena pemerintah tidak secara tegas menyatakan permintaan maaf. Menurutnya, tanpa pengakuan lebih lanjut dan proses hukum bagi pelaku, penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat simbolis dan tidak memberikan keadilan substantif bagi para korban serta keluarganya (BBC Indonesia, 2023).

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A